

LAPORAN
MONITORING, EVALUASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
TRIWULAN I
TAHUN 2025



DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widi Wasa, karena atas kasih karunia-Nya Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan I Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Tujuan dari laporan ini adalah untuk menilai pelaksanaan PPID serta evaluasi terhadap kinerja PPID dalam menyediakan, mengelola, dan memberikan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan ke depan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan laporan ini. Besar harapan kami kepada semua pihak agar dapat memberikan saran dan kritik yang membangun, sehingga dapat dipakai sebagai masukan guna penyempurnaan Laporan Monev Triwulan I Poltekkes Kemenkes Denpasar di masa mendatang.

Akhirnya semoga Laporan Monev ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pegawai/staf di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Denpasar, 15 Maret 2025

Ketua PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar



Ida Bagus Putu Putra Kencana, SST., M.Kes NIP.

1910111199031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bentuk transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Poltekkes Kemenkes Denpasar sebagai salah satu badan publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas untuk mengelola, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Melalui keberadaan PPID, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses informasi secara mudah, cepat, dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka memastikan bahwa pelayanan informasi publik berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan pelayanan informasi publik, memantau pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi.

Monitoring dan evaluasi PPID pada Triwulan I bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan informasi publik pada periode tersebut, memantau jumlah permohonan informasi yang diterima serta tindak lanjutnya, mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelayanan informasi, serta memberikan rekomendasi sebagai upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Triwulan I meliputi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Kegiatan tersebut mencakup pelayanan permohonan informasi publik dari masyarakat, pengelolaan dan dokumentasi informasi publik, publikasi informasi melalui media resmi institusi, serta penanganan pengaduan yang berkaitan dengan layanan

informasi publik. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga mencakup pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dalam menyediakan informasi yang akurat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

C. Tujuan Kegiatan

Monitoring dan evaluasi PPID pada Triwulan I bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memantau pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi, menilai efektivitas pelayanan informasi kepada masyarakat, serta mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik. Hasil monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik pada periode selanjutnya.

D. Manfaat

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPID memberikan berbagai manfaat bagi institusi, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Melalui kegiatan ini, institusi dapat mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan layanan informasi yang telah berjalan, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan serta perencanaan program peningkatan layanan informasi publik di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan pelayanan informasi publik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar dapat terlaksana secara lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB II

TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI

1. Rekomendasi yang Diberikan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Triwulan I, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan guna mendukung optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Salah satu rekomendasi yang diberikan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Peningkatan kapasitas tersebut diperlukan agar petugas PPID memiliki pemahaman yang lebih baik terkait prosedur pelayanan informasi publik, pengelolaan dokumentasi informasi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, pelayanan informasi kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih efektif, cepat, dan akuntabel.

2. Tindak Lanjut yang Dilakukan

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan, telah dilakukan upaya peningkatan pemahaman dan kompetensi petugas PPID melalui kegiatan pembinaan internal serta koordinasi dengan unit kerja terkait mengenai pengelolaan dan penyediaan informasi publik. Selain itu, petugas PPID juga didorong untuk meningkatkan pemahaman terhadap regulasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik agar proses pelayanan informasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya tindak lanjut ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi serta memperkuat kemampuan petugas PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara optimal. Pelaksanaan tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut akan terus dipantau pada periode monitoring dan evaluasi berikutnya.

BAB III

PENCAPAIAN DAN PERBAIKAN

1. Pencapaian dari Tindak Lanjut

Berdasarkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi Triwulan I, telah dilakukan beberapa upaya perbaikan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan koordinasi internal antara petugas PPID dengan unit kerja terkait dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelayanan informasi publik.

Selain itu, petugas PPID juga mulai meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan informasi publik melalui pembinaan internal serta penguatan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan informasi kepada masyarakat dapat diberikan secara lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Upaya tindak lanjut tersebut memberikan dampak positif terhadap kelancaran pelaksanaan pelayanan informasi publik. Proses pengelolaan informasi menjadi lebih terkoordinasi dan respons terhadap permohonan informasi dapat dilakukan secara lebih efektif.

2. Masalah yang Masih Dihadapi

Meskipun berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu kendala yang masih ditemui adalah keterbatasan sumber daya manusia yang secara khusus menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID.

Selain itu, proses pengumpulan data dan informasi dari unit kerja terkadang masih memerlukan waktu yang cukup lama sehingga dapat mempengaruhi kecepatan penyediaan informasi kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dan komitmen dari seluruh unit kerja dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas petugas PPID, penguatan koordinasi dengan unit kerja terkait, serta pengelolaan sistem informasi yang lebih terintegrasi guna mendukung pelayanan informasi publik yang lebih optimal.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Triwulan I di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar, secara umum kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelayanan permohonan informasi publik dapat dilaksanakan secara responsif dan transparan, serta didukung dengan koordinasi antara petugas PPID dan unit kerja terkait dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan.

Selain itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik, antara lain melalui penguatan koordinasi internal serta peningkatan pemahaman petugas PPID terhadap ketentuan keterbukaan informasi publik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan sistem pengelolaan informasi agar pelayanan informasi publik dapat berjalan lebih optimal.

2. Saran

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar, disarankan agar dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan layanan PPID melalui kegiatan pelatihan, sosialisasi, maupun pembinaan terkait pengelolaan informasi publik. Selain itu, perlu dilakukan penguatan koordinasi dengan seluruh unit kerja dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelayanan informasi kepada masyarakat.

Di samping itu, pemanfaatan media informasi dan teknologi juga perlu terus ditingkatkan guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik. Dengan adanya berbagai upaya perbaikan tersebut, diharapkan pelayanan informasi publik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar dapat berjalan secara lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat